

Nomor : 41/Surat Terbuka_JSJKK/VII/2008

Hal : **Langkah Nyata Presiden untuk penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM**

Kepada Yth.

Bapak H. Soesilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Di- Jakarta

Dengan hormat,

Hari ini, kami ke enam puluh sembilan (69) kami para korban, keluarga korban pelanggaran HAM berdiri di depan istana Bapak Presiden. Di kamis ke 69 ini kami kembali mengingatkan tentang janji Bapak Presiden terhadao anu oara jirvab oada tanggal 26 Maret 2008 yang lalu, bahwa Bapak akan mendukung dan mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM sesuai aturan hukum yang ada. Kiranya Pemilu 2009 yang akan segera berlangsung, dan menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, kami berharap bapak segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.

- 1) Dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998/1999, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998. kami meminta kemauan dan keberanian Bapak Presiden daalam mencari jalan keluar atas penolakan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II 1998/1999, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, sebab Jaksa Agung berada dibawah koordinasi Bapak Presiden.
- 2) Dalam Kasus Talangsari 1989 dan pembunuhan Munir, kami berharap Presiden memberikan dukungan sepenuhnya dalam kerja-kerja Komnas HAM sebagai lembaga Negara yang sah. Agar tidak terjadi penolakan pemeriksaan dari saksi purnawirawan TNI maupun POLRI. Karena semua orang sama di mata hukum. Demikian pula dalam kasus pembunuhan Munir, kamu berharap dukungan nyata dan konkret dari presiden untyuk berperan aktif mendorong untuk membukan tabir dalang pembunuh Munir, dari manapun dan siapaun pihak-pihak tersebut.
- 3) Dalam kasus peristiwa 1965/1966, secara jelas DPR RI dan Mahkamah Agung telah dinyatala bahwa rehabilitasi bagi korban 1965 adalah wewenang Bapak Presiden, namun, sampai saat ini Bapak Presiden belum juga memenuhi rekomendasi tersebut.
- 4) Dalam kasus Tanjung Priok 1984, kami berharap Bapak Presiden mengambil langkah atas gagalnya pengadilan HAM ad hoc dalam memberikan keadilan dan kebenaran serta hak hak korban, dengan memperbaiki sistem dan implementasi hukum dan HAM secara nyata, dan mendorong instansi –instansi berwenang untuk memnuhi hak-hak korban pelanggaran HAM.
- 5) Dalam kasus penembakan misterius 1983/1985, kami meminta Bapak Presiden ikut mendorong pengungkapan sejarah dan kebenaran yang terjadi dalam peristiwa tersebut, dengan mendukung Komnas HAM bekerja menemukan fakta yang sesungguhnya, agar peristiwa dan kewenangan kebijakan tidak terulang dimasa yang akan datang. Dan ada kebenaran dan keadilan yang diterima keluarga korban.

Dan untuk semua kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, sperti lumpur LAPINDO, UNAS, peristiwa Monas, dan lain-lain. Kami berharap Bapak Presiden mampu berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia. Terima Kasih,

Jakarta, 19 Juni 2008

Hormat kami,

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan

Sumarsih Suciwati Bejo Untung

Tembusan:

1. Bpk. Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bpk. Ketua Komnas HAM